ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENUMPUKAN PENCAIRAN DANA APBN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DI KPPN BATURAJA

Mardiah Kenamon*
kenamonmardiah@gmail.com
Dosen Prodi Akuntansi Universitas Baturaja
Desi Elma Yunita Sara**
desielmays@gmail.com
Prodi Akuntansi Universitas Baturaja

This research discusses the factors causing the accumulation of disbursement of APBN at the end of the fiscal year at KPPN Baturaja. The research is conducted using 2 types of data, namely primary data and secondary data. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study are (a) partially the budget planning variable (X1) has an influence on the accumulation of disbursement of APBN at the end of the fiscal year at KPPN Baturaja, the variable of budget implementation (X2) has an influence on the accumulation of disbursement of APBN at the end of the fiscal year at KPPN Baturaja, then human resource (X3) has no influence on the accumulation of disbursement of APBN at the end of the fiscal year at KPPN Baturaja then the provision of goods / services (X4) has an influence on the accumulation of disbursement of APBN at the end of the fiscal year at KPPN Baturaja. (b) simultaneously it is known that all X variables together have a significant influence on the accumulation of disbursement of APBN at the end of the fiscal year in KPPN Baturaja. (c) the value of the coefficient of determination (Adjusted R Square) is 0.989, it indicates that 98.9% of the variation in the accumulated disbursement of APBN at the end of the fiscal year in KPPN Baturaja can be explained by the variable budget planning (X1), budget execution (X2), human resource (X3), and the provision of goods / services (X4) while the remaining 1.1% is influenced by variables other than the variables in this research.

Keywords: Accumulation, Disbursement, APBN.

PENDAHULUAN	tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Latar Belakang	dan Tanggungjawab Keuangan
Reformasi keuangan negara	Negara. Penetapan Ketiga paket
di Indonesia ditandai dengan	undang-undang keuangan negara
disahkannya undang-undang	tersebut, diharapkan dapat
keuangan negara, yaitu Undang-	meningkatkan profesionalitas dan
Undang Nomor 10 Tahun 2017	keterbukaan, akuntabilitas, serta

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sehingga membawa dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara termasuk salah satunya adalah pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disusun secara sistematis, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan perekonomian yang diharapkan mendorong pertumbuhan mampu ekonomi. menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. Karena pentingnya

fungsi anggaran dalam perekonomian dan pengertian anggaran tersebut, APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran. Salah satu indikator belanja berkualitas adalah realisasi belanja yang dilaksanakan tepat waktu (Juanda, dkk. 2013).

Masalah utama dalam hal anggaran di pemerintahan adalah ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan targetnya yang mengakibatkan penumpukan pencairan dana APBN pada akir tahun. Permasalahan klasik yang kerap terjadi adalah kondisi di mana penyerapan anggaran rendah di awal tahun (triwulan awal) dan melonjak drastis di akhir tahun (Triwulan IV), dengan kata lain, penyerapan anggaran yang baik dilakukan secara maksimal pada triwulan-triwulan awal sehingga di triwulan akhir pemerintah tidak kewalahan untuk melakukan pencairan anggaran. Namun realita saat ini banyak sekali terjadi fenomena tidak terserapnya anggaran secara optimal sesuai batas ideal penyerapan anggaran triwulan mengakibatkan yang pencairan anggaran mengalami penumpukan. Lapooran realisasi anggaran yang terjadi cenderung rendah di triwulan awal dan meningkat di triwulan akhir. terjadi Fenomena ini juga pemeerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut data laporan realisasi anggaran satuan kerja Tahun 2015 - 2019.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Tahun 2015 – 2019 (Dalam Persentase)

Bula	an	2015`	2016	2017	2018	2019
Triwulan I	Januari	5%	3%	3%	6%	5%
	Februari	12%	11%	10%	26%	26%
	Maret	29%	17%	17%	30%	30%
Triwulan II	April	26%	26%	23%	30%	38%
	Mei	35%	33%	30%	26%	44%
	Juni	52%	51%	40%	50%	50%
Triwulan III	Juli	59%	59%	49%	59%	55%
	Agustus	69%	66%	56%	63%	63%
	September	63%	73%	63%	69%	69%
Triwulan IV	Oktober	86%	80%	69%	67%	77%
	November	88%	87%	83%	76%	84%
	Desember	98%	95%	97%	84%	84%

Sumber: KPPN Baturaja, 2020. (data dioleh)

Berdasarkan tabel 1. bahwa pada Triwulan IV memang terjadi penumpukan pencairan dana yang ditunjukkan oleh besaran realisasi yang cenderung lebih besar dibandingkan triwulan lainnya.

Dapat diamati pula bahwa
penyerapan anggaran tidak merata
pada keempat triwulan. Pada
triwulan-triwulan awal, penyerapan

yang terjadi sangat rendah pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Penyerapan pada Triwulan I kisaran 3% hingga 20%an, pada Triwulan II sebesar 20% hingga 45%an, pada Triwulan III sebesar 50%an, dan pada Triwulan IV sekitar 80%an. Tidak hanya pada tahun 2019 saja, tahun-tahun sebelumnyapun pada pola penyerapan anggaran Pemerintah menunjukan yang terjadi penumpukan Triwulan IV. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, pada tahun 2017 penyerapan anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 80%an yang lebih besar dibandingkan penyerapan pada triwulantriwulan sebelumnya. Jumlah penyerapan pada Triwulan IV ini sudah sedikit menurun pada tahun 2018, namun tetap terjadi penumpukan dibandingan triwulantriwulan sebelumnya.

Keterlambatan penyerapan anggaran belanja juga dapat mengakibatkan manajemen kas Menurut pemerintah terganggu. Wiliams (2004)secara spesifik tujuan dari manajemen kas adalah untuk menjamin bahwa pemerintah dapat membiayai semua pengeluarannya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya serta dapat meminimalisir terjadinya idle cash. *Idle cash* adalah dana yang berlebih di rekening kas pemerintah yang belum terpakai untuk pembayaran kewajiban. Kas berlebih dapat digunakan untuk ditempatkan di bank sentral maupun di bank umum untuk mendapat remunerasi atau imbal hasil. Jika penyerapan anggaran terlambat maka dana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja akan tidak terpakai dan dapat menimbulkan idle cash. Dengan terjadinya hal ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum dapat menikmati program pelayanan masyarakat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan bentuk pelayanan lainnya secara maksimal.

Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran memiliki dampak terhadap peningkatan dan percepatan proses penyerapan anggaran pemerintah sehingga penumpukan pencairan dana pada akhir tahun dapat dihindari. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun. Sudarwati, dkk (2017: 129) mengidentifikasi empat faktor yaitu perencanaan anggaran,

pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia sebagai faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun.

Pencairan **APBN** yang menumpuk di akhir tahun juga terjadi di KPPN Baturaja sebagai salah satu tempat dimana APBN dicairkan. Data tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran melalui realisasi belanja memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah faktorfaktor apa saja yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun di KPPN Baturaja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah lebih tepat belanja barang dan jasa oleh pemerintah merupakan injeksi dalam arus berputar. Seperti investasi pengeluaran adalah dalam barang yang secara tidak langsung berasal dari rumah tangga (Hasyim, 2015: 31). Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa merupakan salah satu bentuk dari peranan pemerintah dalam perekonomian modern yaitu peranan alokasi. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar tersebut menjadikan pemerintah berperan penting dan bertanggung jawab dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.

Anggaran dan Penganggaran Sektor Publik

Menururt Halim (2017: 92) mendefinisikan anggaran sebagai suatu pernyataan yang merincikan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu dan diukur dengan ukuran finansial. Adapun penganggaran merupakan mekanisme dan prosedur persiapan/perencanaan, implementasi monitoring anggaran. dan Penganggaran sektor publik merupakan hal yang krusial dan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Proses penganggaran dilaksanakan dalam satu tahun dari proses persiapan, persetujuan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi dan monitoring.

Penganggaran merupakan instrumen dari mekanisme birokrasi organisasi pada suatu berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam anggota organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan organisasi. sasaran Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi histories dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2012: 65).

Perencanaan Anggaran

Menurut Halim (2016: 93), salah satu fungsi penganggaran sebagai alat perencanaan manejemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Dengan melakukan perencanaan anggaran yang optimal, pemerintah daerah dapat memprediksi akan digunakan untuk apa suatu anggaran ke depannya. Suatu anggaran telah direncanakan dari mana sumber

pendapatannya sejak awal dan nantinya akan digunakan untuk apa sehingga anggaran dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Dengan demikian, anggaran tersebut dapat menjadi patokan dalam merealisasikan program atau kegiatan pemerintah daerah dan akan meminimalisir Penumpukan Pencairan Anggaran pada akhir tahun.

Penumpukan Pencairan Dana APBN

Anggaran belanja dapat mendorong roda perekonomian jika penyerapannya dilakukan secara cepat maksimal. Kegagalan target berakibat penyerapan anggaran hilangnya manfaat belanja, karena dialokasikan tertunda dana yang pemanfaatannya, yang artinya ada dana yang menganggur (idle money). Pola penyerapan anggaran belanja cenderung menumpuk pada yang waktu tertentu yaitu pada akhir tahun anggaran juga akan mengurangi fungsi

APBN tersebut. Menurut Halim (2017: 92), penyerapan anggran adalah anggaran. realisasi dari **Terdapat** beberapa tahapan di dalam siklus anggaran dimulai dari yang perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Di tingkat daerah, di mana penetapan dan pengesahan anggaran dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tahapan penyerapan dimulai ketika Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD disahkan oleh DPRD.

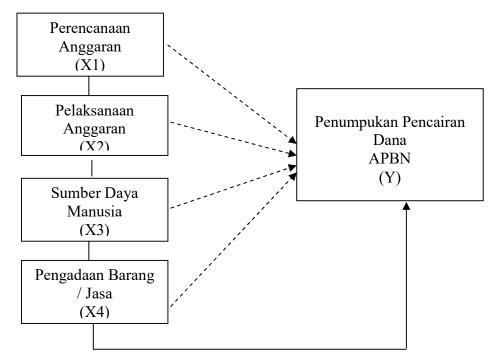
Menurut Mardiasmo (2012: 45), kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa besar yang berhasil

dicapai atau diserap. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual yaitu serapan dengan yang dianggarkan. Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin baik kinerja manajer publik tersebut. Suatu Pemda (Pemerintah Daerah) seharusnya dapat melakukan penyerapan anggaran secara ideal yaitu penyerapan anggaran yang dilakukan secara merata dari Triwulan I hingga Triwulan IV yang masing-masing triwulannya terserap sebesar 25% dari iumlah anggaran yang ada. Penumpukan pencairan dana yang cenderung rendah di awal tahun berdampak terhadap terjadinya pencairan penumpukan anggaran menjelang akhir tahun. Hal tersebut terjadi akibat pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal. yang Pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan inkonsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang baik, karena saat ini penumpukan pencairan dana menjadi tolok ukur dalam penilaian dikatakan sebagai budaya organisasi karena kejadiannya terus berulang.

Kerangka Konseptuan

kinerja suatu perangkat daerah. Karena kejadian ini sudah sering terjadi bahkan berulang setiap tahunnya, bisa

Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:



Hipotesis

Menurut para ahli Arikunto (2010: 110), "hipotesis didefinisikan sebagai sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul". Hipotesis penelitian dalam ini adalah: diduga faktor – faktor (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan penyediaan barang jasa) berpengaruh terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja baik secara parsial maupun simultan.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

penelitian Jenis yang penelitian digunakan dalam ini adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam menjelaskan mengenai fenomena atau gejala yang ada, peneliti mencoba menggali variabelvariabel baru yang berhubungan dengan gejala tersebut pada studi kasus di suatu area dengan populasi tertentu. Peneliti bertujuan untuk lebih memperdalam mengenai gejala yang ada sehingga dapat digunakan untuk merumuskan masalah dengan lebih terperinci, dan hasil penelitian dapat menjadi arah kebijakan para pengambil keputusan di masa mendatang. Ruang lingkup dan objek penelitian Satuan yaitu Kerja

Vertikal lingkup pembayaran KPPN Baturaja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor menyebabkan penumpukan yang pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja, dan untuk melihat bagaimana pengaruh atas faktor-faktor tersebut terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dengan narasumber pelaksana anggaran, yaitu pejabat para pengguna anggaran dari Satuansatuan Kerja di wilayah kerja KPPN Baturaja. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan

penelitian, misalnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun secara periodik oleh KPPN Baturaja yang berisi data-data pagu anggaran dan jumlah realisasi anggaran dari tahun 2015 – 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2011: 142) kuesioner adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membri seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Populasi

Menurut Arikunto (2010: 173), "Populasi adalah seluruh subjek penelitian." Populasi dalam penelitian adalah seluruh objek yang diteliti (diamati, diwawancarai dan

sebagainya) dimana peneliti akan menarik kesimpulan tentang objek itu. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai adalah **KPPN** Baturaja. Populasi dalam penelitian diketahui jumlahnya karena catatan resmi serta perhitungan yang akurat dengan total populasi sebanyak 12 pegawai KPPN Baturaja dan seluruh satuan kerja (satker) lingkup **KPPN** Baturaia yang berkaitan dengan penyerapan dna APBN sebanyak 15 satker. Dikarenakan jumlahnya kurang dari 100 maka seluruh populasi diambil semua, hal ini berdasarkan pendapat Arikunto (2010: 138). "untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi."

Teknik Analisis

Analisis Data

Analisis data adalah analisis yang dihitung berdasarkan hasil dari kuesioner yang berupa jawaban dari responden. Menurut Sugiyono (2010: 95), dari penelitian jawaban atas pertanyaan pada angket akan diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari pernyataan yaitu

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral(N)

Skor 4 = Setuju(S)

Skor 5 =Sangat Setuju (SS)

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2015: 57-69), pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi yang akan dilakukan mencakup pengujian normalitas, multikoliniearitas, heteroskedastisitas.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda karena menguji hubungan antara satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independen.

Regresi linear berganda

adalah suatu alat analisis peramalan

nilai pengaruh dua variabel bebas

atau lebih terhadap variabel terikat

untuk membuktikan ada atau

tidaknya hubungan fungsi /

hubungan antara dua variabel bebas

atau lebih.

Persamaan regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

.....(1)

Dimana:

Y = Penumpukan Pencairan DanaAPBN a = Konstanta Persamaan Regresi b_1 = Koefisien regresi variabel
perencanaan anggaran (X_1) b_2 = Koefisien regresi variabel
pelaksanaan anggaran (X_2) b_3 = Koefisien regresi variabel
sumber daya manusia (X_3) b_4 = Koefisien regresi variabel
penyediaan barang / jasa (X_4) X_1 = Variabel perencanaan anggaran X_2 = Variabel pelaksanaan anggaran X_3 = Variabel sumber daya manusia X_4 = Variabel penyediaan barang /
jasa

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode data kuantitatif. Digunakan metode kuantitatif karena penelitian ini akan menganalisis masalah yang diwujudkan dengan nilai tertentu. Analisis ini akan dilakukan menggunakan program komputer yakni SPSS 16.0.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

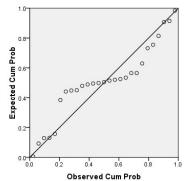
Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak karena model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis grafik, adapun hasilnya dapat dilihat dari grafik normal P-P Plot sebagai berikut

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penumpukan pencairan dana APBN (Y)



Gambar 2 Grafik Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan grafik normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal sehingga berada pada kategori normal. Dengan demikian, maka dari grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai kerena telah memenuhi asumsi normalitas.

h. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS version 16.0 for window. Mendeteksi terjadi tidaknya atau multikolinearitas pada sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai tolarance > 0.10 berarti tidak mengandung multikolinieritas.

No.	Nama Variabel	Tolerance	VIF	
1.	Perencanaan Anggaran (X1)	0,028	35,878	
2.	Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.018	55.155	
3.	Sumber Daya Manusia (X3)	0.646	1.548	
4.	Penyediaan barang / jasa) (X4)	0.060	16.724	

Sumber: Data primer (diolah), April 2020

hasil

Berdasarkan perhitungan yang tersaji dalam tabel 5.6 di atas, diperoleh nilai VIF untuk variabel Perencanaan Anggaran (X1) sebesar 35,878, nilai VIF untuk variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) sebesar 55.155, nilai VIF untuk variabel Sumber Daya Manusia (X3) sebesar 1.548, nilai VIF untuk variabel Penyediaan barang / jasa) (X4)sebesar 16.724. Keempat variabel independen tersebut berada di bawah angka 10. Sedangkan untuk nilai tolerance variabel Perencanaan Anggaran (X1) sebesar 0,028, nilai variabel tolerance Pelaksanaan Anggaran (X2) sebesar 0.018, nilai

tolerance variabel Sumber Daya Manusia (X3) sebesar 0.646, nilai tolerance variabel Penyediaan barang / jasa) (X4) sebesar 0.060. Nilai tolerance tiga variabel indenpenden tersebut lebih besar dari angka 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

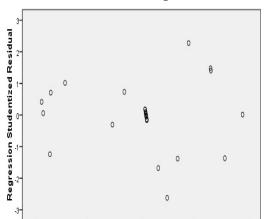
d. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dalam *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas didapatkan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat (Y) berdasarkan masukan variabel bebas yaitu X1, X2, X3 dan X4.

Gambar 3
Dependent Ginhieff drugskannerejndom a APBN (Y)

Scatterplot



Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

a. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linear

berganda dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS 16.0 for Windows. Hasil analisis data yang

telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Persamaan Regresi

		Unstandardiz	Unstandardized Coefficients			
Mode	el	B Std. Error				
1	(Constant)	.473	.410			
	Perencanaan Anggaran (X1)	723	.090			
	Pelaksanaan Anggaran (X2)	.759	.132			
	Sumber Daya Manusia (X3)	006	.023			
	Penyedia Barang/Jasa (X4)	.655	.052			

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN (Y)

Sumber: Data primer (diolah), April 2020

Berdasarkan tabel 5.7 di atas didapat persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 0.473 - 0.723X_1 + 0.759X_2 - 0.006X_3 + 0.655X_4$

Dari persamaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Nilai konstanta sebesar 0,473. Hal ini menunjukkan jika tidak ada variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan penyediaan barang/jasa bernilai nol, maka penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja sebesar 0,473.
- 2. Nilai koefisien regresi $X_1 = -$ 0,723 bernilai positif, menunjukkan jika variabel perencanaan anggaran mengalami penurunan sebesar satu-satuan maka penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja mengalami akan penurunan sebesar 0,723 satuan variabel dengan asumsi pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan penyediaan

- barang/jasa bernilai nol dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi $X_2 = 0.759$ 3. bernilai positif, menunjukkan variabel jika pelaksanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka penumpukan pencairan dana **APBN** pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja akan mengalami peningkatan sebesar 0,759 satuan dengan asumsi variabel perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan penyediaan barang/jasa bernilai nol dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi $X_3 = 0.006$ bernilai positif, menunjukkan iika variabel sumber daya manusia mengalami penurunan sebesar satu-satuan maka penumpukan pencairan dana **APBN** pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja akan

- mengalami penurunan sebesar 0,006 satuan dengan asumsi variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyediaan barang/jasa bernilai nol dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi $X_4 = 0.655$ 5. bernilai positif, menunjukkan iika variabel penyediaan barang/jasa mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka penumpukan pencairan dana **APBN** pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja akan mengalami peningkatan sebesar 0,655 satuan dengan asumsi variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan sumber daya manusia bernilai nol dianggap tetap.

b. Uji Hipotesis

Setelah seluruh variabel yang diteliti telah melalui uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, serta estimasi regresi, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian hipotesis:

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

> Tabel 4 Hasil Uji t

			\leq t	tabel,	artii	ıya	tidak
Model		t	signifi	kan	atau	tidak Sig.	ada
1	(Constant)		penga	rāh	antara	variav	vel ²⁶ X
	Perencanaan Anggaran (X1)		-8.04				.000
	Pelaksanaan Anggaran (X2)		terl 5 a7d	ap v	ariabel	Y	.000
	Sumber Daya Manusia (X3)		25	-			.798
	Penyedia Barang/Jasa (X4)	-	Hø2di	g lal	k jika -t _l	hitung ≤	- toooi

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN (Y)

Sumber : Data primer (diolah), April 2020

Berdasarkan tabel 4 diperoleh t_{hitung} untuk variabel perencanaan anggaran (X1) sebesar -8,042 dengan t_{tabel} ($\alpha/2=0,05/2=0,025$) dan df = (n-k-1) yaitu (27-4-1 = 22), untuk uji dua pihak diperoleh $t_{tabel}=2,073$ dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan uji t adalah sebagai berikut: (Priyatno, 2011: 270).

pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2009: 238). Adapun hasil hitung untuk uji t statistik dapat dilihat pada tabel *coefficients* berikut:

- Ho diterima jika $-t_{tabel} \le t_{hitung}$

atau $t_{hitung} \ge t_{tabel}$, artinya signifikan atau ada pengaruh antara variavel X terhadap variabel Y

Kemudian pada tabel 4 untuk variabel pelaksanaan anggaran (X2) diperoleh $t_{hitung} = 5,751$, dengan t_{tabel} ($\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$) dan df = (n-k-1) yaitu (27-4-1 = 22), untuk uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 2,073$. Berdasarkan kriteria keputusan ternyata nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 5,751

> 2,073, maka keputusannya Ho ditolak artinya ada pengaruh signifikan variabel pelaksanaan anggaran terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.

Kemudian pada tabel 4 untuk variabel sumber daya manusia (X3) diperoleh $t_{hitung} = -0.259$, dengan t_{tabel} $(\alpha/2 = 0.05/2 = 0.025)$ dan df = (n-k-1) yaitu (27-4-1 = 22), untuk uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = -2,073$. Berdasarkan kriteria keputusan ternyata nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau -0,259 < - 2,073, maka keputusannya Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel sumber daya manusia terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.

Selanjutnya pada tabel 4 untuk variabel penyediaan barang/jasa (X4) diperoleh $t_{hitung} = 12,679$, dengan t_{tabel} ($\alpha/2 = 0,05/2 = 12,679$)

0.025) dan df = (n-k-1) yaitu (27-4-1 = 22), untuk uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 2,073$. Berdasarkan kriteria keputusan ternyata nilai thitung > ttabel atau 12,679 2,073, maka keputusannya Ho ditolak artinya ada pengaruh signifikan variabel penyediaan barang/jasa terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaia.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui dapat apakah seluruh variabel X yaitu perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), sumber daya manusia (X3), dan penyediaan barang/jasa (X4) secara bersamaberpengaruh sama tidak atau terhadap penumpukan pencairan akhir dana **APBN** pada tahun anggaran di KPPN Baturaja, maka digunakan uji signifikansi simultan dan hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	252.663	4	63.166	571.464	.000ª
	Residual	2.432	22	.111		
	Total	255.095	26			

- a. Predictors: (Constant), Penyedia Barang/Jasa (X4), Sumber Daya Manusia (X3), Pelaksanaan Anggaran (X2), Perencanaan Anggaran (X1)
- b. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN (Y)

Sumber: Data primer (diolah), April 2020

Berdasarkan tabel 5, didapatkan Fhitung sebesar 571,464. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha =$ 5% dengan F tabel = F $(1 - \alpha)$ (dk pembilang = 4), (dk penyebut = 27-4-1 = 22) didapat F tabel 2,66. Jadi F hitung > F tabel atau 571,464 > 2,66, maka keputusannya H_o ditolak, artinya seluruh variabel X yaitu perencanaan anggaran (X1),pelaksanaan anggaran (X2), sumber daya manusia (X3), dan penyediaan barang/jasa (X4) secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.

c. Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)

Analisis koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* berikut:

Tabel 6 Model Summary^b

Model	R	R Square	-	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.990	.989	.33247

- b. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN (Y)

Sumber: Data primer (diolah), April 2020

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,989 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,9% variasi dari penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja bisa variabel dijelaskan oleh perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), sumber daya manusia (X3), dan penyediaan barang/jasa (X4) sedangkan sisanya sebesar 1,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan telah yang

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

parsial

variabel

1. Secara

a. Predictors: (Constant), Penyedia Barang/Jasa (X4), Sumber Daya Manusia (X3), Pelaksanaan Anggaran (X2), Perencanaan Anggaran (X1) penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja, variabel pelaksanaan anggaran (X2) ada pengaruh terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada anggaran akhir tahun KPPN Baturaja, kemudian sumber daya manusia (X3) tidak ada pengaruh terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja selanjutnya penyediaan barang/jasa (X4) mempunyai pengaruh terhadap penumpukan pencairan dana

- APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.
- 2. Secara simultan diketahui seluruh variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja.
- 3. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0.989 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,9% variasi dari penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja bisa dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), sumber daya manusia (X3), dan penyediaan barang/jasa sedangkan (X4)sisanya 1,1% dipengaruhi sebesar

oleh variabel lain selain variabel dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diambil saran sebagai berikut.

- a. Menambah variabel penelitian terkait dengan keterlambatan penyerapan anggaran belanja seperti variabel sumber daya manusia dan revisi anggaran;
- b. Menambah teknik pengumpulan data melalui wawancara yang lebih mendalam kepada satuan kerja yang terkait dengan penumpukan anggaran APBN.
 - seperti responden yang berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, BPKP selaku APIP, kalangan akademisi, atau pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta:Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi

 Analisis Multivariate dengan

 Program SPSS 3 ED.

 Semarang: Penerbit

 Unniversitas Diponegoro.
- H. Heriyanto, "Faktor-Faktor yang
 Mempengaruhi

 Keterlambatan Penyerapan
 Anggaran Belanja pada
 Satuan Kerja
 Kementrian/Lembaga di
 Wilayah Pembayaran
 Jakarta," Tesis Universitas
- Halim, Abdul. & Kusufi,

 Muhammad Syam. 2012.

 Akuntansi Sektor Publik

 Akuntansi Keuangan Daerah

 Edisi 4. Jakarta : Salamba

 Empat
- Halim, Abdul. 2017. Manajemen

 Keuangan Seketor Publik

 Problematika Penerimaan dan

 Pengeluaran Pemerintah

 (Anggaran Pendapatan dan

 Belanja Negera/Daerah).

 Jakarta: Salamba Empat.
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2015. *Ekonomi Makro*. Jakarta: KENCANA

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.

 Yogjakarta: STIM
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyatiningsih, Endang. 2013.

 Metode Penelitian Terapan

 Bidang Pendidikan. Jakarta:

 Alfabeta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2015.

 *Pengembangan Sumber Daya

 Manusia. Jakarta: Rineka Cipta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015.

 Akuntansi Sektor Publik Teori,

 Konsep, Aplikasi. Yogjakarta:

 Pustaka Baru Press
- Wirasata. 2010. *Ankuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga.